ELASTISITAS

ISSN: 2655-6944

ELASTISITAS

http://elastisitas.unram.ac.id

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vol. 8, No. 1, Maret 2026

PENGARUH KAPASITAS FISKAL TERHADAP KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA DI PULAU JAWA TAHUN 2015-2024

Putri Delia Mafiroh[1*], Risqi Noor Hidayati Putri[2]

[1,2]Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Info Artikel

Kata Kunci:
Kapasitas Fiskal, Indeks Pembangunan Manusia, Fixed Effect Model

ABSTRAK

Pembangunan manusia tetap menjadi tujuan utama kebijakan pembangunan regional di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, di mana ketidakmerataan kapasitas fiskal antar provinsi dapat memengaruhi variasi hasil pembangunan manusia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2015–2024. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel melalui Model Efek Tetap (FEM), penelitian ini menyelidiki bagaimana kapasitas fiskal regional mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia. Temuan menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap HDI, menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal secara langsung berkontribusi pada kinerja pembangunan manusia yang lebih baik. Sebaliknya, Belanja Modal memiliki dampak negatif dan signifikan, menyiratkan bahwa pengalokasian anggaran yang tidak tepat atau sifat jangka panjang dampaknya mungkin tidak sejalan dengan peningkatan HDI jangka pendek. Sementara itu, DAK menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Secara keseluruhan, ketiga variabel independen tersebut secara statistik signifikan. Hasil ini menegaskan pentingnya mengoptimalkan kapasitas fiskal regional untuk mempercepat kemajuan pembangunan manusia di Jawa.

Keywords:
Fiscal Capacity, Human Development Index, Fixed Effect Model

ABSTRACT

Human development remains a central objective of regional development policy in Indonesia, particularly in Java Island, where disparities in fiscal capacity across provinces may influence variations in human development outcomes. This study aims to analyze the influence of Regional Original Revenue (PAD), Capital Expenditure, and the Special Allocation Fund (DAK) on the Human Development Index (HDI) in six provinces on Java Island during the 2015–2024 period. Utilizing a quantitative approach with panel data regression through the Fixed Effect Model (FEM), it investigates how regional fiscal capacity drives improvements in human development quality. The findings reveal that PAD exerts a positive and significant effect on HDI, indicating that enhanced fiscal independence directly contributes to better human development performance. Conversely, Capital Expenditure has a negative and significant impact, suggesting that misallocated spending or the long-term nature of its effects may not align with short-term HDI gains. Meanwhile, DAK shows a positive and significant influence. Collectively, all three independent variables are statistically significant. These results confirm the paramount importance of optimizing regional fiscal capacity to accelerate human development progress in Java.

***Corresponding Author: putri.22131@mhs.unesa.ac.id**

1. PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi ke peningkatan kualitas hidup yang inklusif dan berkelanjutan diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Badan Pusat Statistik, 2024). Dalam konteks Indonesia, komitmen ini diperkuat oleh kerangka regulasi nasional, dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025 yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama (UU No. 17, 2007). Desentralisasi fiskal pasca-Reformasi, yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya guna memenuhi tujuan tersebut (Putra & Ulupui, 2015). Kapasitas fiskal daerah, yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus (DAK), menjadi instrumen kunci untuk membiayai layanan esensial di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, faktor penentu utama IPM (Rumbia et al., 2025; Sarkoro, 2016). Namun, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia menghadapi kompleksitas akibat keragaman kapasitas fiskal, variasi karakteristik daerah, dan dinamika politik lokal yang unik, terutama di Pulau Jawa sebagai wilayah dengan kontribusi ekonomi terbesar sekaligus disparitas yang tajam. Studi ini berfokus pada Jawa karena wilayah ini merepresentasikan mikro-kosmos tantangan dan peluang desentralisasi fiskal Indonesia, di mana interaksi ketiga instrumen fiskal tersebut dengan outcome pembangunan manusia membutuhkan investigasi empiris yang mendalam.

Data terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan ketimpangan signifikan antara provinsi-provinsi di wilayah Pulau Jawa. DKI Jakarta menunjukkan capaian tertinggi secara nasional dengan skor 84,15, disusul oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan skor 81,62. Di sisi lain, Banten (76,35) dan Jawa Timur (75,35) mencatat skor yang hanya sedikit di atas rata-rata nasional. Sebaliknya, Jawa Barat (74,92) dan Jawa Tengah (73,87) mencatat skor yang sedikit di bawah rata-rata nasional. Perbedaan capaian tersebut menggambarkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Pulau Jawa belum terdistribusi secara merata antarwilayah, meskipun berada dalam satu kawasan dengan tingkat aktivitas ekonomi yang relative tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya faktor struktural dan kebijakan daerah yang berpotensi memengaruhi variasi kinerja pembangunan manusia di masing-masing provinsi. Selain itu, disparitas ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah tidak selalu sejalan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup manusia

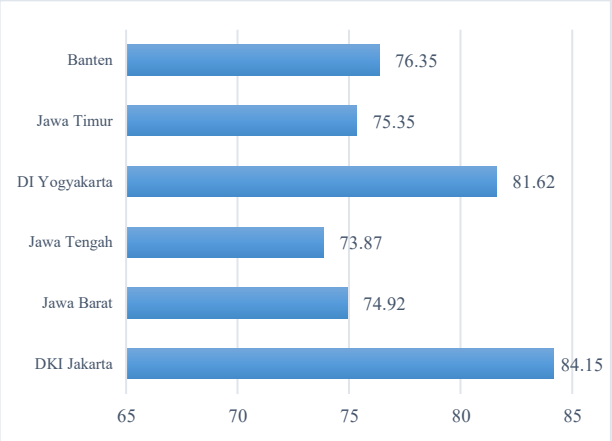

Gambar 1. Perbandingan tingkat IPM antarprovinsi di Pulau Jawa tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), diolah

Hubungan antara kapasitas fiskal dan kinerja IPM tidak linier dan ditandai oleh ketidakpastian empiris. Data tahun 2024 menunjukkan disparitas yang mencolok di Pulau Jawa dimana Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai IPM sangat tinggi mesti kapasitas fiskal relatif rendah, sementara Banten dengan kemampuan fiskal kuat justru IPM-nya hanya rata-rata nasional (Badan Pusat Statistik, 2024; Kemenkeu, 2024). Visualisasi rasio indeks kapasitas fiskal antar provinsi di Jawa (Gambar 2.) memperkuat bukti adanya kesenjangan struktural ini, di mana besaran kemampuan fiskal tidak menunjukkan pola yang konsisten dengan pencapaian IPM. Kontradiksi ini mengindikasikan bahwa besaran kapasitas fiskal tidak otomatis berkorelasi positif dengan *outcome* pembangunan, diduga akibat faktor seperti efektivitas alokasi, time lag kebijakan, atau kapasitas kelembagaan lokal. Lebih lanjut, literatur terdahulu menghasilkan temuan yang tidak konsisten, pengaruh PAD, Belanja Modal, dan DAK terhadap IPM bervariasi dari positif, tidak signifikan, hingga negatif, menciptakan gap pengetahuan yang perlu diklarifikasi. Beberapa studi mendukung pengaruh positif PAD dan Belanja Modal (Rumbia et al., 2025; Sarkoro, 2016), sementara yang lain menemukan DAK justru berpengaruh negatif atau Belanja Modal tidak signifikan (Hasan & Agung, 2018; Nashshar, 2022). Ketidakkonsistenan ini mungkin bersumber dari perbedaan periode studi, metode analisis, atau variabel kontrol, namun yang lebih mendasar adalah kurangnya pemahaman tentang mekanisme strategis dan *trade-off* antara ketiga instrumen fiskal dalam konteks spesifik suatu wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kapasitas fiskal dan kinerja

pembangunan manusia bersifat kontekstual dan memerlukan pengujian empiris yang lebih terfokus pada karakteristik wilayah kajian.

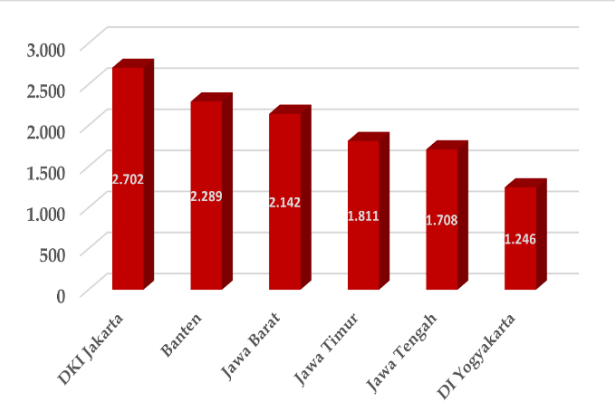

Gambar 2. Rasio Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
Sumber: Kementerian Keuangan (2024), diolah (2025)

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan laporan realisasi APBD DJPK oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah di Pulau Jawa selama periode 2015-2024 menunjukkan perbedaan yang jelas antarprovinsi. DKI Jakarta secara konsisten mencatat proporsi PAD tertinggi dibandingkan provinsi lain, yang mencerminkan kuatnya basis ekonomi dan kemampuan fiskal daerah dalam menghimpun pendapatan sendiri. Sebaliknya, Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan proporsi PAD terendah, yang menggambarkan keterbatasan kapasitas fiskal akibat struktur ekonomi yang lebih sempit dan ketergantungan pada sektor tertentu. Perbedaan ini mengindikasikan adanya variasi tingkat kemandirian fiskal antarprovinsi di Pulau Jawa, yang berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan peningkatan kualitas manusia

Data Belanja Modal berdasarkan laporan realisasi APBD DJPK oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal pemerintah di Pulau Jawa selama periode 2015-2024 menunjukkan dinamika yang tidak seragam antarprovinsi. DKI Jakarta secara umum mencatat proporsi Belanja Modal relatif tertinggi pada awal periode pengamatan, mencerminkan kemampuan fiskal yang lebih besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, Jawa Tengah konsisten menunjukkan proporsi Belanja Modal terendah dibandingkan provinsi lain, yang mengindikasikan keterbatasan ruang fiskal untuk investasi pembangunan. Perbedaan ini menggambarkan adanya variasi kapasitas fiskal dan prioritas kebijakan antarprovinsi di Pulau Jawa, yang berpotensi memengaruhi efektivitas pembangunan sektor-sektor penentu kuaitas hidup masyarakat.

Data Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan laporan realisasi APBD DJPK oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa alokasi Dana Alokasi Khusus di provinsi-provinsi Pulau Jawa selama periode 2015-2024 menunjukkan variasi yang cukup besar antarprovinsi. Jawa Barat secara umum mencatat proporsi DAK tertinggi dibandingkan provinsi lain, terutama pada periode sebelum dan saat pandemi, yang mencerminkan kuatnya peran transfer pusat dalam mendukung pendanaan program prioritas di daerah tersebut. Sebaliknya, DKI Jakarta konsisten menunjukkan proporsi DAK terendah, bahkan pada awal periode tidak menerima alokasi DAK, yang menggambarkan rendahnya ketergantungan terhadap transfer bersifat khusus dari pemerintah pusat. Perbedaan ini mencerminkan variasi kebutuhan fiskal dan karakteristik kapasitas keuangan daerah di Pulau Jawa.

Secara konseptual, tujuan akhir dari kapasitas fiskal dan desentralisasi fiskal adalah perluasan kebebasan (*capabilities*) dan peningkatan kesejahteraan manusia oleh Amartya Sen (1999). Dalam kerangka ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai proksi untuk mengukur perluasan kapabilitas dasar tersebut. Secara teoritis, mekanisme untuk mencapainya didukung Teori Desentralisasi Fiskal oleh Oates (1972) dan Teori Transfer Antar Pemerintah oleh Musgrave (1989), yang menekankan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan. Namun, ketidakkonsistenan antara harapan teoritis, realita empiris, dan temuan penelitian sebelumnya menyiratkan bahwa mekanisme pengaruh ketiga variabel fiskal tersebut, baik secara individual maupun sinergis, mungkin lebih kompleks dan kontekstual, dimoderasi oleh faktor lain seperti tata kelola, akuntabilitas, publik, dan kualitas institusi. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menjembatani gap tersebut dengan menguji secara empiris peran kapasitas fiskal dalam konteks spesifik Pulau Jawa. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti mengenai pengaruh PAD, Belanja Modal, dan DAK terhadap kinerja IPM, baik secara parsial maupun simultan, serta berkontribusi pada diskusi akademis tentang kondisi *boundary* dimana Teori Desentralisasi Fiskal dapat dioperasionalkan secara optimal di negara berkembang.

Berdasarkan kerangka teoritis dan identifikasi gap, penelitian ini memiliki empat hipotesis: (H1) PAD berpengaruh positif terhadap IPM melalui peningkatan akuntabilitas fiskal dan

kemandirian daerah dalam membiayai program prioritas; (H2) Belanja Modal berpengaruh positif terhadap IPM melalui pembangunan infrastruktur publik yang meningkatkan akses dan layanan dasar; (H3) DAK berpengaruh positif terhadap terhadap IPM sebagai stimulus fiskal terarah yang mengatasi kesenjangan pembiayaan untuk program prioritas nasional; dan (H4) Ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM, mencerminkan sinergi dalam kerangka desentralisasi fiskal yang komprehensif. Temuan studi diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perbaikan formulasi kebijakan fiskal daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran, terutama dalam mendesain intervensi yang berbeda untuk daerah dengan profil kapasitas fiskal dan kinerja IPM yang beragam seperti Yogyakarta dan Banten.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (Creswell, 2018), untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini dilakukan pada enam provinsi di Pulau Jawa dengan periode pengamatan tahun 2015-2024. Data yang digunakan adalah data panel sekunder melalui metode dokumentasi yang diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk variabel independen dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data IPM hingga diperoleh 60 observasi.

Analisis data dilakukan metode dokumentasi, dengan regresi data panel menggunakan Eviews 12, mengikuti metodologi yang dijelaskan dalam studi ekonometrika (Gujarati & Porter, 2009). Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pemilihan model terbaik (*Common Effect Model, Fixed Effect Model, atau Random Effect Model*) melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier; pengujian asumsi klasik yang meliputi Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Normalitas; serta pengujian hipotesis dengan Uji Parsial (t), Uji Simultan (F), dan Uji Koefisien Determinasi (R^2). Uji Autokorelasi yang umumnya kritikal pada data *time series* tidak dilakukan dalam penelitian ini karena data panel yang digunakan memiliki dimensi waktu (*time series*) yang relatif terbatas, sehingga kemunculan masalah autokorelasi dianggap minimal secara teoritis (Widarjono, 2018).

Data diolah dengan model regresi data panel sebagai berikut:

$$\mathbf{IPM_{it} = \alpha + \beta 1 PAD_{it} + \beta 2 BM_{it} + \beta 3 DAK_{it} + \varepsilon_{it}}$$

Keterangan:

IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
BM	: Belanja Modal
DAK	: Dana Alokasi Khusus
α	: Konstanta
β_1, β_2, β_3	: Koefisien regresi
ε	: Error term

Pengukuran variabel dilakukan sebagai berikut: PAD diukur dengan rasio (PAD/Pendapatan Daerah) x 100 % yang menggambarkan tingkat kemandirian fiskal atau kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dari sumber daya lokal. Belanja Modal diukur dengan rasio (BM/Belanja Daerah) x 100% yang menggambarkan prioritas fiskal daerah terhadap investasi jangka panjang dalam bentuk aset fisik dan infrastruktur publik. DAK diukur dengan rasio (DAK/Pendapatan Daerah) x 100 % yang menggambarkan. IPM diukur menggunakan indeks komposit (1-100) dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggambarkan tingkat ketergantungan dan besarnya dukungan fiskal terarah dari pemerintah pusat untuk mendanai program-program prioritas nasional di daerah. Sementara itu, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur menggunakan indeks komposit (skala 0-100) dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang menggambarkan pencapaian rata-rata dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), serta standar hidup layak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Analisis data panel pada penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh variabel fiskal terhadap IPM. Langkah pertama dalam pemilihan model adalah melakukan Uji Chow. Uji Chow dilakukan untuk memilih antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil uji ini menunjukkan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,0000, yang signifikan pada tingkat α =5%. Temuan ini memberikan bukti statistik yang kuat untuk menolak CEM, sekaligus mengindikasikan keberadaan heterogenitas spesifik yang tidak terobservasi antar kabupaten/kota di Pulau Jawa. Oleh karena itu, *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih sebagai pendekatan estimasi yang lebih tepat untuk mengontrol variasi karakteristik unik masing-masing wilayah.

Selanjutnya, untuk memastikan konsistensi estimator, dilakukan Uji Hausman yang membandingkan antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Hasil uji menunjukkan statistik Chi-square signifikan pada level 5% (*p-value* = 0,0000). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa asumsi dasar *Random Effect Model* (REM) yakni tidak adanya korelasi antara efek individu tidak terobservasi dengan variabel independen dan tidak terpenuhi dalam penelitian. Oleh karena itu, *Fixed Effect Model* (FEM) dipastikan sebagai model estimasi yang konsisten dan dipilih sebagai model akhir untuk analisis regresi data panel ini.

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman yang secara konsisten dan signifikan mendukung *Fixed Effect Model* (FEM), maka Uji Lagrange Multiplier (LM) tidak diperlukan. Uji LM berfungsi memilih antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Namun, karena CEM telah ditolak oleh Uji Chow dan REM juga ditolak oleh Uji Hausman, maka FEM telah terkonfirmasi sebagai model terbaik tanpa memerlukan uji lanjutan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independen. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi tinggi yang mengindikasikan masalah mulltikolinearitas serius. Nilai korelasi tertinggi adalah -0,122 antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal, sementara korelasi antara PAD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Belanja Modal dan DAK masing-masing sebesar -0,401 dan -0,495. Semua nilai ini berada jauh dibawah ambang batas (0,85). Dengan demikian, asumsi tidak adanya multikolinearitas tinggi dalam model regresi terpenuhi, dan ketiga variabel fiskal dapat dipertahankan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan metode *Glejser* untuk menguji apakah varians residual dari model bersifat konstan. Hasil regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen menunjukkan bahwa tidak satupun variabel yaitu PAD (p-value = 0,1667), Belanja Modal (0,3290), dan DAK (0,9013) yang signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α = 5%. Dengan demikian, tidak terdapat bukti statistik untuk menolak asumsi homoskedastisitas. Hal ini mengindikasikan bahwa varians residual dalam model adalah konstan dan masalah heteroskedastisitas tidak terdeteksi. Oleh karena itu, estimasi standar error dari model regresi dasar dapat dianggap valid untuk proses regresi selanjutnya.

Selanjutnya, Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah residual model regresi berdistribusi normal. Hasil Uji Jarque Bera menghasilkan statistik sebesar 1,241 dengan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,538. Nilai probabilitas ini jauh di atas tingkat signifikansi α =5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Dukungan tambahan diperoleh dari nilai skewness sebesar -0,340 yang mendekati normalitas residual terpenuhi, yang berarti model telah memenuhi salah satu prasyarat penting untuk pengujian statistik yang valid.

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Berdasarkan prosedur pemilihan model yang telah diuraikan, estimasi akhir dilakukan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil lengkap estimasi regresi data panel yang menjelaskan penagruh kapasitas fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa periode 2015-2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Regresi

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	63.83374	16.04326	0.0000
PAD	0.221738	3.831573	0.0004
BM	-0.300005	-5.410186	0.0000
DAK	0.096102	2.370918	0.0216
Effects Spesification			
Cross-section fixed (dummy variable)			
R-squared		0.909488	
Adjusted R-squared		0.895289	
S.E. of regression		1.378805	
Sum squared resid		96.95623	
Log likehood		-99.53376	
F-statistic		64.05728	
Prob(F-statistic)		96.95623	

Sumber: Eviews 12, data diolah (2025)

Hasil estimasi regresi *Fixed Effect Model* (FEM) disajikan dalam Tabel 1. Nilai Prob(*F-statistic*) sebesar 0,0000 yang menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan, yang berarti variabel independen (PAD, Belanja Modal, dan DAK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat signifikansi 5%. Secara parsial, hasil uji-t mengungkapkan bahwa ketiga variabel juga berpengaruh signifikan. Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,2217 dan signifikan pada level 5% (*p-value* = 0,0004), mengindikasikan pengaruh positif. Sementara itu, Belanja Modal memiliki koefisien negatif sebesar -0,3000 dan signifikan pada level 5% (*p-value* =

0,0000). Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berpengaruh positif dan signifikan pada level 5% dengan koefisien sebesar 0,0961 (*p-value* = 0,0216). Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,895289 mengindikasikan bahwa sekitar 89,53% variasi dalam IPM dapat dijelaskan oleh ketiga variabel fiskal dalam model ini, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Berdasarkan hasil pada Tabel 1., persamaan model empiris yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$IPM_{it} = 63{,}83374 + 0{,}221738PAD_{it} - 0{,}300005 BM_{it} + \beta 0{,}096102DAK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
PAD : Pendapatan Asli Daerah
BM : Belanja Modal
DAK : Dana Alokasi Khusus
ε : Error term

Berdasarkan model regresi yang telah diestimasi, dapat diuraikan interpretasi hasilnya. Nilai intercept sebesar 63.83374 menunjukkan tingkat dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan bernilai nol. Koefisien regresi untuk PAD sebesar 0,221738 mengindikasikan pengaruh positif, dimana setiap kenaikan PAD sebesar satu unit akan meningkatkan IPM sebesar 0,221738 unit, *cateris paribus*. Di sisi lain, Belanja Modal memiliki koefisien negatif sebesar -0,300005, yang berarti peningkatan Belanja Modal justru berkaitan dengan penurunan IPM dalam model ini. Sementara itu, DAK juga berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 0.096102, meskipun besaran pengaruhnya lebih kecil dibandingkan dengan PAD. Secara relatif, temuan ini menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terkuat, diikuti oleh DAK dengan pengaruh positif yang lebih lemah, sedangkan Belanja Modal menunjukkan hubungan negatif yang cukup kuat terhadap IPM di Pulau Jawa pada periode penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendaptan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pendapatan daerah (PAD) memberikan dampak yang bersifat positif dan signifikan pada IPM provinsi-provinsi Pulau Jawa periode 2015–2024. Signifikansi statistik ini mengindikasikan adanya hubungan langsung antara kapasitas fiskal mandiri suatu daerah dengan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Secara empiris, besaran PAD yang dikelola pemerintah daerah berbanding lurus dengan perluasan ruang fiskal untuk menyediakan layanan publik yang mendorong kemajuan pada bidang yang terkait pembangunan manusia, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan standar hidup layak.

Dalam perspektif ekonomi publik, peningkatan PAD memperkuat ruang fiskal yang dapat digunakan untuk mendanai program pembangunan manusia. Ketersediaan pendapatan lokal memungkinkan pemerintah daerah daerah menambah investasi pada layanan esensial, memperbarui sarana pendidikan, memperluas akses kesehatan, dan meningkatkan infrastruktur sosial. Perbaikan pada sektor-sektor tersebut kemudian memberikan dampak pada meningkatnya produktivitas dan kemampuan masyarakat, sehingga tercermin melalui peningkatan IPM. Dengan kata lain, PAD berperan sebagai sumber pembiayaan yang langsung mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Temuan penelitian ini sesuai dengan kerangka desentralisasi fiskal yang diuraikan oleh Oates (1972), yang menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan entitas yang paling memahami kebutuhan serta karakteristik masyarakat di wilayahnya masing-masing. Ketika daerah memiliki kapasitas fiskal melalui PAD, proses pengalokasian anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai prioritas lokal. Pemanfaatan PAD untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial merupakan bentuk implementasi teori Oates yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih efisien dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, hubungan positif antara PAD dan IPM menguatkan relevansi teori ini dalam konteks daerah di Pulau Jawa.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga memberikan bukti serupa. Pidhegso (2025) menemukan bahwa PAD memiliki kontribusi positif dalam peningkatan IPM di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian Rumbia et al. (2025) turut menunjukkan bahwa pendapatan daerah berperan penting dalam pembiayaan layanan dasar, yang kemudian meningkatkan indikator pendidikan dan kesehatan. Konsistensi hasil penelitian terdahulu dengan temuan penelitian ini memberikan keyakinan bahwa PAD memang menjadi komponen yang berperan nyata dalam mendorong pembangunan manusia.

Jika ditinjau secara regional, hubungan positif ini semakin terlihat jelas pada daerah-daerah di Pulau Jawa yang memiliki potensi ekonomi lebih besar dibandingkan wilayah lain. PAD yang tinggi di

Pulau Jawa memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan dana secara efisien untuk layanan publik. Dengan kepadatan penduduk tinggi, kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas, dan PAD dapat menjadi sumber pembiayaan utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan PAD di Pulau Jawa memiliki dampak yang kuat terhadap peningkatan IPM.

Melalui uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa PAD menjadi faktor yang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan IPM di Pulau Jawa. Semakin besar kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang mendukung peningkatan kualitas hidup. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan dan pengelolaan PAD secara optimal merupakan langkah penting dalam mempercepat peningkatan kinerja pembangunan manusia di tingkat daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil empiris menunjukkan pengaruh negatif signifikan Belanja Modal terhadap IPM di Pulau Jawa (2015–2024). Nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal justru berkaitan dengan penurunan nilai IPM selama periode 2015-2024. Kondisi ini menandakan bahwa penggunaan Belanja Modal belum menghasilkan perbaikan langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Secara konseptual, hubungan negatif ini dapat muncul apabila Belanja Modal lebih berfokus pada pembangunan sarana fisik yang manfaatnya baru dirasakan dalam jangka panjang. Selain itu, menurut Teori Pembangunan Manusia (Sen, 1999), belanja pemerintah akan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan apabila diarahkan pada penyediaan layanan dasar yang berkualitas dan tepat sasaran, sehingga ketidaktepatan perencanaan pelaksanaan dapat menghambat kontribusi Belanja Modal terhadap peningkatan pelayanan dasar. Dengan demikian, tingginya Belanja Modal tidak otomatis mencerminkan efektivitas pembangunan apabila pelaksanaannya belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Menurut perspektif desentralisasi fiskal Oates (1972), hasil ini mengindikasikan bahwa kewenangan fiskal yang dimiliki daerah belum digunakan secara optimal. Oates menyatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya mampu mengalokasikan anggaran lebih tepat sasaran karena memahami kebutuhan masyarakatnya. Namun, ketika Belanja Modal tidak diarahkan pada prioritas peningkatan layanan publik atau tidak dikelola dengan baik, maka tujuan desentralisasi untuk meningkatkan kesejahteraan tidak tercapai. Kondisi tersebut tercermin dalam hasil penelitian di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Peningkatan Belanja Modal justru diikuti oleh penurunan kinerja pembangunan manusia, yang merepresentasikan adanya disparitas antara kapasitas fiskal daerah dan kualitas implementasi belanja daerah.

Temuan ini tidak konsisten dengan beberapa studi yang menyimpulkan bahwa Belanja Modal meningkatkan IPM, seperti Masduki et al. (2022) dan Nashshar (2022) yang menunjukkan bahwa investasi pemerintah pada fasilitas publik berdampak positif pada pembangunan manusia. Namun, temuan ini searah dengan penelitian Sugiyarto et al. (2025), yang menemukan bahwa efisiensi belanja di daerah tertinggal relatif rendah, mengindikasikan bahwa Belanja Modal dapat berdampak kurang optimal ketika terjadi ketidaksesuaian antara jenis belanja dengan kebutuhan masyarakat atau ketika proses pelaksanaannya tidak efisien. Perbedaan hasil tersebut menggambarkan bahwa dampak Belanja Modal sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaannya.

Fenomena ini semakin terlihat jelas di Pulau Jawa, di mana tingginya aktivitas ekonomi dan penduduk menciptakan kebutuhan pelayanan publik yang kompleks. Banyak Belanja Modal dialokasikan untuk proyek berjangka panjang yang belum memberikan kontribusi langsung terhadap indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Selain itu, karakter perkotaan yang padat sering kali menyebabkan proses pembangunan fisik memerlukan waktu lebih lama, sehingga dampaknya baru terasa pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, analisis data menunjukkan bahwa proporsi Belanja Modal atas total Belanja Daerah (dalam persentase) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Pulau Jawa dan bahkan memberikan pengaruh negatif yang signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi Belanja Modal agar dampak positifnya dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Penyesuaian alokasi Belanja Modal sesuai kebutuhan layanan publik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil estimasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) terbukti berperan secara positif dan

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Pulau Jawa selama periode 2015-2024. Koefisien positif menunjukkan bahwa bertambahnya alokasi DAK diikuti oleh peningkatan nilai IPM di daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran DAK telah berkontribusi langsung pada perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat selama periode penelitian.

Dampak tersebut dapat dijelaskan melalui karakteristik DAK yang penggunaannya diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. melalui mekanisme tersebut, DAK berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mendorong kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dasar, sehingga secara langsung berkontribusi dalam perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori Transfer Antar Pemerintah oleh Musgrave (1989), hasil positif ini menunjukkan bahwa mekanisme transfer fiskal dari pusat ke daerah berfungsi sesuai tujuan utamanya, yaitu mengurangi kesenjangan kapasitas pendanaan antarwilayah serta menjamin tersedianya standar pelayanan publik minimum. Menurut Musgrave, daerah dengan kemampuan pendapatan terbatas membutuhkan dukungan fiskal agar tetap mampu menyediakan layanan penting bagi masyarakat. dalam konteks penelitian ini, DAK menjadi instrumen yang memungkinkan pemerintah daerah memperbaiki sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Temuan positif tersebut menandakan bahwa peran pemerintah pusat melalui transfer DAK telah berjalan efektif dalam memperkuat layanan publik yang pada akhirnya mendorong peningkatan pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini konsistem dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa DAK memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pembangunan manusia. Studi yang dilakukan oleh Pidhegso (2025) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Insani et al. (2024) juga mengungkapkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Konsistensi hasil menunjukkan dampak positif berkelanjutan DAK di berbagai wilayah.

Pada wilayah Pulau Jawa, keberadaan DAK sangat strategis mengingat tingginya kebutuhan layanan publik karena jumlah penduduk yang besar. DAK dapat membantu pemerintah daerah menangani tekanan layanan pendidikan dan kesehatan yang meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, dana ini turut berperan mengurangi jurang fiskal antara daerah yang memiliki penerimaan tinggi dan daerah yang masih memerlukan dukungan pusat untuk memenuhi standar pelayanan dasar.

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) terbukti berkontribusi signifikan yang bersifat positif dan signifikan dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa selama periode 2015-2024. Hasil ini menunjukkan bahwa program berbasis DAK berjalan efektif apabila perencanaannya tepat dan pelaksanaannya sesuai ketentuan. Optimalisasi pengelolaan DAK sangat diperlukan agar kontribusi anggaran tersebut dapat terus memperkuat kualitas layanan publik dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Uji simultan memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan atau bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan pada kinerja pembangunan manusia di wilayah Pulau Jawa selama periode 2015-2024. Temuan ini megindikasikan bahwa ketiga indikator fiskal secara bersama-sama menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam menjelaskan variasi IPM sepanjang periode penelitian, sehingga model yang digunakan dinilai layak untuk menjelaskan hubungan antara kapasitas fiskal dan pembangunan manusia.

Secara ekonomi, temuan ini mengindikasikan bahwa capaian pembangunan manusia tidak semata-mata dipengaruhi oleh satu jenis instrumen fiskal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai pendanaan daerah dan dukungan fiskal dari pemerintah pusat. PAD memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program sesuai kebutuhan setempat, Belanja Modal berperan dalam menyediakan infrastruktur publik yang mendukung peningkatan kualitas hidup, sedangkan DAK memastikan ketersediaan layanan dasar yang wajib dipenuhi. Ketiganya bekerja secara saling melengkapi sehingga berdampak signifikan ketika dianalisis secara simultan.

Jika ditinjau dari teori Pembangunan Manusia yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999), pengaruh signifikan ketiga kapasitas fiskal ini menggambarkan bagaimana pendanaan publik

berperan dalam memperluas kemampuan dasar (capabilities) masyarakat. Sen menegaskan bahwa kemajuan manusia melampaui sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk menjalani keahidupan yang sehat, memperoleh akses pendidikan, serta menikmati standar hidup yang layak. PAD, Belanja Modal, dan DAK bersama-sama menyediakan infrastruktur , layanan kesehatan, serta sarana pendidikan yang memungkinkan masyarakat memperluas pilihan hidupnya. Dengan demikian, hasil simultan ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan IPM membutuhkan dukungan fiskal yang terpadu dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup.

Pada wilayah Pulau Jawa yang memiliki keberagaman sosial-ekonomi antardaerah, sinergi ketiga kapasitas fiskal ini menjadi sangat penting. Daerah dengan PAD tinggi dapat mengarahkan program pembangunan sesuai prioritasnya, sedangkan daerah dengan kapasitas fiskal lebih rendah dapat tetap menjaga keberlanjutan pelayanan publik melalui dukungan DAK. Belanja Modal yang terdistribusi dengan baik juga memperkuat fondasi infrastruktur regional. Oleh karena itu, pengaruh signifikan secara simultan mencerminkan bahwa keberhasilan pembangunan manusia di Pulau Jawa sangat bergantung efektivitas pemrintah daerah dalam pengelolaan sumber daya fiskal secara terpadu.

Secara keseluruhan, hasil analisis mengonfirmasi bahwa PAD, Belanja Modal, dan DAK memiliki peran signifikan secara bersama-sama dalam meningkatkan kinerja pembangunan manusia di Pulau Jawa selama periode 2015-2024. Hasil ini memperlihatkan bahwa perbaikan kualitas pelayanan publik tidak semata-mata bertumpu pada satu jenis pendanaan, tetapi memerlukan integrasi antara pendapatan daerah, investasi publik, dan transfer fiskal dari pemerintah pusat. Optimalisasi pemanfaatan ketiga instrumen fiskal tersebut menjadi kunci bagi pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan manusia secara berkelanjutan. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa keterpaduan PAD, Belanja Modal, dan DAK mencerminkan bagaimana kapasitas fiskal berkontribusi nyata terhadap kinerja pembangunan manusia di Pulau Jawa Tahun 2015-2024.

Implikasi Kebijakan Fiskal Daerah dan Keterbatasan Penelitian

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan IPM di daerah memerlukan pengelolaan kapasitas fiskal yang terintegrasi. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan PAD sebagai sumber pembiayaan yang fleksibel, meningkatkan efektivitas Belanja Modal agar lebih berorientasi pada layanan publik, serta memastikan pemanfaatan DAK sesuai dengan tujuan sektor prioritas. Sinergi antara pendapatan daerah, belanja publik, fan transfer fiskal menjadi kunci dalam mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain terbatas pada wilayah Pulau Jawa dan belum memasukkan aspek kualitas belanja atau faktor institusional daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menambah variabel kualitas tata kelola, serta menggunakan pendekatan dinamis agar dapat menangkap dampak jangka panjang kebijakan fiskal terhadap pembangunan manusia.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh kapasitas fiskal terhadap kinerja pembangunan manusia di Pulau Jawa selama periode 2015-2024 dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai indikator fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas dan arah pemanfaatannya. PAD memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam membiayai layanan publik yang secara langsung mendukung peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Sementara itu, DAK terbukti efektif sebagai instrumen transfer fiskal yang memperkuat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar. Sebaliknya, Belanja Modal yang belum terfokus pada sektor-sektor penunjang pembangunan manusia cenderung memberikan dampak positif dalam jangka pendek.

Secara simultan, PAD, Belanja Modal, dan DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM, yang menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan hasil dari keterpaduan berbagai instrumen fiskal. Temuan ini memperkuat Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 1972) dan teori pembangunan manusia (Sen, 1999), serta memberikan kontribusi empiris baru dnegan menunjukkan bahwa efektivitas fiskal lebih menentukan dibandingkan sekedar peningkatan alokasi anggaran, khususnya di wilayah dengan

tingkat aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk tinggi seperti Pulau Jawa.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan PAD melalui perluasan basis pendapatan dan peningkatan transparansi agar kontribusinya terhadap kualitas layanan publik semakin maksimal. Selain itu, Belanja Modal perlu diarahkan secara lebih strategis pada proyek yang secara langsung mendukung sektor pendidikan dan kesehatan, disertai penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar dampaknya terhadap pembangunan manusia dapat dirasakan lebih cepat. Pemerintah pusat juga perlu mempertahankan dan menyempurnakan kebijakan DAK, khususnya dalam penyesuaian alokasi dengan kebutuhan spesifik daerah serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi. Agar peran DAK dalam meningkatkan IPM semakin efektif dan merata.

Selanjutnya, penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti mendatang memasukkan variabel kualitas belanja, efisiensi anggaran, atau indikator tata kelola fiskal, serta mempertimbangkan penggunaan pendekatan spasial atau data kabupaten/kota agar mampu menangkap variasi pembangunan manusia secara lebih detail. Dengan demikian, kajian mengenai kapasitas fiskal dan pembangunan manusia dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks pembangunan manusia*. https://www.bps.go.id

Creswell. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Management Research* (5th Editio). SAGE Publications, Inc. 2455. https://doi.org/10.4324/9781003381006-9

Gujarati & Porter. (2009). Basic Econometrics. In *Introductory Econometrics: A Practical Approach*.

Hasan, M. A., & Agung, M. F. S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan alokasi belanja modal sebagai variabel intervening (studi pada kabupaten/kota Riau periode 2011–2015). *Jurnal Akuntansi*, *6*(2), 190–203.

Insani, M. H., Manan, A., & Agustiani, E. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota NTB tahun 2018–2022. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, *4*(2), 355–366.

Kemenkeu. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.

Masduki, U., Rindayati, W., & Mulatsih, S. (2022). How can quality regional spending reduce poverty and improve human development index? *Journal of Asian Economics*, *82*(June), 101515. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101515

Musgrave. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th Editio). McGraw-Hill.

Nashshar, M. I. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *7*(3), 255–270. https://doi.org/10.33105/itrev.v7i3.474

Oates, W. E. (1972). An essay on fiscal federalism. *Fiscal Federalism and European Economic Integration*, *XXXVII*(September), 13–47. https://doi.org/10.4324/9780203987254

Pidhegso. (2025). The Influence of Regional Original Revenue (PAD) And Balancing Funds on the Human Development Index of Regencies/Cities in Indonesia. *Journal of Practical Management Studies*, *3*(1), 22–31. https://doi.org/10.61106/jpms.v3i1.37

Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *11(3)*, 863–877.

Rumbia, W. A., Oleo, H., & Tenggara, S. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia: Analisis Data Panel Provinsi 12*. 1191–1199.

Sarkoro, H. (2016). Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi KhusuS dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. In *Identity Politics in India and Europe*. Oxford University Press. https://doi.org/10.4135/9788132108009.n31

Sugiyarto, A., Lee, B. L., & Wilson, C. (2025). Narrowing the gap: Dynamics of Indonesia's public expenditure performance in economically lagging districts. *Economic*

Analysis and Policy, *85*(November 2024), 2299–2318. https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.03.014

UU No. 17. (2007). *RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025*.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika:Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (5th ed.).